

DAFTAR PUSTAKA

- A.Widiada Gunakaya, S.A., 2012, "*Peranan Kriminologi Dalam Menetapkan Kebijakan Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana*", Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung.
- AZ. Nasution, 1999, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Daya Widya, Jakarta
- AG. Subarsono, 2010, "*Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anoraga dan Widiyanti, 2003, "*Dinamika Koperasi*", Rineka Cipta, Jakarta.
- AZ. Nasution, 1999, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Daya Widya, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, "*Metodologi Penelitian Hukum*", cetakan ke -14 Rajawali Pers, Jakarta.
- Bernard Nainggolan, 2011, "*Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor, dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*", PT. Alumni, Bandung.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, "*Metodologi Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta.
- CST Kansil, 1989, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Utrecht, 1963, "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*", Cet VI, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- G. Kartasapoetra, et al, 2005, "*Praktek Pengelolaan Koperasi*", cet ke-7, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadi Sutrisno, 1982, "*Metodologi Research*", Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hendrojogi, 2007, "*Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ishaq, 2009, "*Dasar-dasar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.

- Oemar Hamalik, 2007, "*Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*", PT. Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2011 "*Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*", Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- _____, 2012, "*Hukum Administrasi dan Good Governance*", Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Made Darma Weda, 1996, "*Kriminologi*", cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mazmanian, Daniel H, dan Paul A Sabatier, 1983, "*Implementation And Public Policy*", HarperCollins, New York.
- Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn, 2001, "*The Policy Implementation Process*". Sage Publication: Beverly Hill.
- Mohammad Hatta, 1954, "*Korporasi*", cet 1, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Muladi, 1995, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*", Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Munir Fuady, 2002, "*Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983, "*Intisari Pidana*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (PP IKAHI), 2016, "*Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Rianto Nugroho, 2006, "*Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan Proses*", Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Satijipto Raharjo, 2000, "*Ilmu Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, 2011, "*Pengantar Ilmu Hukum*", PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, "*Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*", Alumni Ahaem Patahaem, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1991, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", CV. Widya Karya, Semarang.

Shidarta, 2006, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Cet. III, PT. Grasindo, Jakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*", Grafitti Pers, Jakarta.

RT. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005, "*Hukum Koperasi Indonesia*", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Tangkilisan, HeselNogi, 2003, "*Implementasi Kebijakan Publik*", Lukman Offset, Yogyakarta.

Thoby Mutis, 2004, "*Pengembangan Koperasi*", cet.4, PT. Grasindo, Jakarta.

Widiyanti, et al., 1998, "*Koperasi dan Perekonomian Indonesia*", Rineka, Jakarta.

Widjaya, 1984, "*Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*", Era Swasta, Jakarta.

Yopie Morya Immanuel Patiro, 2012, "*Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*", Cetakan Pertama, Keni Media

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Jurnal dan Internet:

Barda Nawawi Arief, *“Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana”*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998.

Dede Zaki Mubarak, *“Menkop : Tidak Ada Sanksi Pidana dalam RUU Koperasi”*, <https://www.rmol.id/read/2012/02/20/55442/Menkop:-Tidak-Ada-Sanksi-Pidana-dalam-RUU-Koperasi-?page=3>, diunduh pada Jumat 21 Agustus 2020, pukul 10.00 WIB.

Dika Yudianto dan Norma Dewi, 2016 *“Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah,”* Jurnal Serambi Hukum.

Mohammad Sahlan, April 2016, *“Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi”*, Jurnal: HUKUM IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 23.

Philipus M. Hadjon, 1997, *“Tentang Wewenang”*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII.

